

2023 LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN AUDITED



SKIPM JAMBI

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun KIPM Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun KIPM Jambi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi 06 Mei 2024

Kepala Stasiun KIPM Jambi,



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Per 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada periode Per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 35,940,066. atau mencapai 38% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 94,655,000.

Realisasi Belanja Negara pada periode Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6,978,006,041 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7,053,196,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat sebesar Rp. 8,696,875,004 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 15,259,421; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 8,681,615,583 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 12,764,158 dan Rp. 8,684,110,846

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO kegiatan operasional untuk periode sampai dengan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 29,590,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 7,104,090,650 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 7,074,500,650. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 12,749,955 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 7,087,250,605.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 8,829,295,476 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 7,087,250,605 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6,942,065,975 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 8,684,110,846.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2023		% thd Angg	Per 31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	94,655,000	35,940,066	37.97	57,945,000
JUMLAH PENDAPATAN		94,655,000	35,940,066	37.97	57,945,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3,894,986,000	3,865,044,748	99.23	3,839,344,011
Belanja Barang	B.4	3,008,210,000	2,965,077,293	98.57	2,333,160,764
Belanja Modal	B.5	150,000,000	147,884,000	98.59	
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-			
JUMLAH BELANJA		7,053,196,000	6,978,006,041	98.93	6,172,504,775

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan G	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	15,259,421	46,532,399
Jumlah Aset Lancar		15,259,421	46,532,399
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2,619,362,100	2,619,362,100
Peralatan dan Mesin	C.15	7,240,225,432	7,192,341,432
Gedung dan Bangunan	C.16	5,769,905,432	5,669,905,432
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	430,201,000	430,201,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	19,850,000	19,850,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(7,397,928,381)	(7,154,500,858)
Jumlah Aset Tetap		8,681,615,583	8,777,159,106
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	467,151,240
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	(448,051,219)
Jumlah Aset Lainnya		-	19,100,021
JUMLAH ASET		8,696,875,004	8,842,791,526
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	12,764,158	13,496,050
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12,764,158	13,496,050
JUMLAH KEWAJIBAN		12,764,158	13,496,050
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	8,684,110,846	8,829,295,476
JUMLAH EKUITAS		8,684,110,846	8,829,295,476
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,696,875,004	8,842,791,526

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	29,590,000	57,945,000
JUMLAH PENDAPATAN		29,590,000	57,945,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,865,044,748	3,836,842,611
Beban Persediaan	D.3	322,460,374	303,907,054
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,515,568,023	1,267,209,631
Beban Pemeliharaan	D.5	537,125,132	401,950,119
Beban Perjalanan Dinas	D.6	620,464,850	394,913,500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	243,427,523	631,239,651
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		7,104,090,650	6,836,062,566
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,074,500,650)	(6,778,117,566)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non lancar		(12,750,021)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6,350,000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		19,100,021	-
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar Lainnya		(12,750,021)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		66	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	5,979,490
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		66	(5,979,490)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(12,749,955)	(5,979,490)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,087,250,605)	(6,784,097,056)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	8,829,295,476	9,497,516,657
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,087,250,605)	(6,784,097,056)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6,942,065,975	6,115,875,875
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(145,184,630)	(668,221,181)
EKUITAS AKHIR	E.5	8,684,110,846	8,829,295,476

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Jambi

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Stasiun KIPM Jambi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan cara penerapan sistem Manajemen Mutu.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.92 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Sersan UD Syawal - Paalmerah Jambi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan

- Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan infasive, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
 - g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
 - h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
 - i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 - j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati Ikan;
 - k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
 - m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati;
 - n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan

o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan sesuai dengan KEP-291/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

Pendapatan

-LO

- yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

- ❖ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- ❖ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ❖ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

(1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

(2) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp.35.940.066*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 35.940.066 atau mencapai 38 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.94.655.000. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Jambi terdiri dari Pendapatan Jasa, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa		20,000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		6,350,000	
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	94,655,000	29,570,000	
Pendapatan Lain-lain	-	66	
Jumlah	94,655,000	35,940,066	37.97

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 baru mencapai 37,97% di sebabkan menurunnya permintaan untuk pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya di Laboratorium SKIPM Jambi.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2023	Realisasi Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan	35,940,000	57,945,000	-37.98
Pendapatan Lain-lain	66	-	0.00
Jumlah	35,940,066	57,945,000	-37.98

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara Rp
6.978.006.041*

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2023 Rp. 6.978.006.041 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.053.196.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,894,986,000	3,865,044,748	99.23
Belanja Barang	3,008,210,000	2,965,077,293	98.57
Belanja Modal	150,000,000	147,884,000	98.59
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7,053,196,000	6,978,006,041	98.93

Realisasi belanja semester II Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 13,05 % dikarenakan Tahun 2023 terdapat anggaran belanja modal dan adanya peningkatan anggaran belanja barang tahun 2023 dibandingkan Tahun lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2023	Realisasi Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,865,044,748	3,839,344,011	0.67
Belanja Barang	2,965,077,293	2,333,160,764	27.08
Belanja Modal	147,884,000	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	6,978,006,041	6,172,504,775	13.05

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp 3.865.044.748*

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.865.044.748 dan Rp 3.839.344.011. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 0,67 persen dari Per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya Kenaikan belanja lembur pegawai di Semester II Tahun 2023.

*Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	Realisasi Per 31 Des 2023	Realisasi Per 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,864,175,498	1,900,313,676	(1.90)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,686,624,250	1,659,054,664	1.66
Belanja Lembur	314,245,000	279,976,000	12.24
Jumlah Belanja Kotor	3,865,044,748	3,839,344,340	0.67
Pengembalian Belanja Pegawai		(329)	-
Jumlah Belanja	3,865,044,748	3,839,344,011	0.67

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp.
2.965.077.293*

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.965.077.293 dan Rp 2.333.160.764. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 mengalami Peningkatan sebesar 27,08% dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya anggaran belanja barang untuk TA. 2023

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Des 2023	Realisasi Per 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja barang operasional	899,442,535	852,746,276	5.48
Belanja barang non operasional	225,948,847	71,255,550	217.10
Belanja jasa	390,908,533	342,438,705	14.15
Belanja pemeliharaan	536,899,532	381,679,522	40.67
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	620,464,850	394,913,500	57.11
Belanja Barang Persediaan	291,412,996	290,127,211	0.44
Jumlah Belanja Kotor	2,965,077,293	2,333,160,764	27.08
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,965,077,293	2,333,160,764	27.08

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp147.884.000,-

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 147.884.000,- dan Rp 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2023 SKIPM Jambi memiliki anggaran untuk belanja modal yang dipergunakan untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Des 2023	Realisasi Per 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,884,000	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	147,884,000	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	147,884,000	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 47.884.000,- dan Rp 0,-. Adapun belanja modal peralatan dan mesin semester II Tahun ini berupa Alat Pengelola Data yaitu TV dan Laptop.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Des 2023	Realisasi Per 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,884,000	0	0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	47,884,000	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	47,884,000	0	0.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp0,-. Tahun ini SKIPM Jambi untuk belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan berupa pembuatan pagar di wilker Nipah Panjang Tanjabtim.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Des 2023	Realisasi Per 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0	0	#DIV/0!
perizinan Pembangunan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	#DIV/0!
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	100,000,000	0	100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	100,000,000	0	100.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tahun 2023 tidak penambahan belanja untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per September 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Des 2023	Realisasi Per 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Air Baku	0	0	#DIV/0!
Jaringan Listrik	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan di Tahun 2023 tidak ada belanja modal lainnya di SKIPM Jambi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Per 31 Desember 2023 tidak ada kas di bendahara pengeluaran.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Uang Tunai	-	-
Kuitansi	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Daftar PNBPN disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Uang Tunai	-	-
Bank -	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNBPN

Piutang PNBPN Rp 0,-

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tahun 2023 tidak terdapat piutang PNBPN di SKIPM Jambi. Rincian Piutang PNBPN disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPN Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

No	Nama	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA Per 31 Desember
2023 dan 2022*

No	Nama	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan

*Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Jenis	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan Rp 15.259.421

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 15.259.421 dan Rp 46.532.399. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Barang Konsumsi	13,593,621	20,999,599
Bahan untuk Pemeliharaan	95,000	320,600
Bahan Baku	1,570,800	25,212,200
Jumlah	15,259,421	46,532,399

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Per
31 Desember 2023 dan 2022*

No	Debitur	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA Per 31 Desember
2023 dan 2022*

No	Debitur	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-

Piutang Jangka Panjang Rp0

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp. 2.619.362.100

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Jambi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.619.362.100 dan Rp2.619.362.100. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2022	2,619,362,100
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	2,619,362,100

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Pembelian :

Tidak ada mutasi tambah.

2. Transfer Masuk senilai :

Tidak ada transfer masuk.

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2023

Rincian Tanah Per 31 Desember 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	500 m2	Kota Baru Jambi	1,630,941,000
2	438 m2	Tanjung Jabung Barat	919,505,000
3	900 m2	Jambi	18,000,000
4	2.000 m2	Kabupaten Muaro Bunga	49,600,000
5	1657 m2	Tanjung Jabung Timur	1,316,100
Jumlah			2,619,362,100

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
7.240.225.432*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp7.240.225.432 dan Rp7.192.341.432 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7,192,341,432
Mutasi tambah:	
Pembelian	47,884,000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Masuk	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	7,240,225,432
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(6,365,360,526)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	874,864,906

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin berupa:

Mutasi Tambah:

a. Pembelian :

1. Pembelian alat Pengelola Data berupa TV dan Laptop sebesar Rp. 47.884.0000,-

b. Transfer Masuk senilai :

Tidak ada transfer masuk.

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2023

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.5.769.905.432*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 5.769.905.432 dan Rp 5.669.905.432. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,669,905,432
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung dan Bangunan	100,000,000
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	5,769,905,432
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	(702,843,056)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5,067,062,376

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

Mutasi Tambah:

- a. Pembangunan :
 1. Pembangunan berupa pagar di wilker Nipah Panjang Tanjabti sebesar Rp. 100.000.000,-
- b. Transfer Masuk senilai :

Tidak ada transfer masuk.

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2023

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp 430.201.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp430.201.000 dan Rp430.201.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	430,201,000
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	430,201,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(329,724,799)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	100,476,201

Mutasi Tambah:

(1) Pembelian :

Tidak ada mutasi tambah.

(2) Transfer Masuk senilai :

Tidak ada transfer masuk.

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2023

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp19.850.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp19.850.000 dan Rp 19.850.000. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk per 31 Desember 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	19,850,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	19,850,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	19,850,000

Mutasi Tambah:

1. Pembelian :

Tidak ada mutasi tambah.

2. Transfer Masuk senilai :

Tidak ada transfer masuk.

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2023

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp. 0,-. Sampai dengan tanggal neraca per 31 Desember 2023 tidak ada konstruksi dalam pengerjaan. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1		-		-	
2					
Jumlah		-		-	

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
7.397.928.381,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 7.397.928.381,- dan Rp 7.154.500.858,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan kecuali untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7,240,225,432	6,365,360,526	874,864,906
2	Gedung dan Bangunan	5,769,905,432	702,843,056	5,067,062,376
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	430,201,000	329,724,799	100,476,201
4	Aset Tetap Lainnya	19,850,000	0	19,850,000
Akumulasi Penyusutan		13,460,181,864	7,397,928,381	6,062,253,483

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Stasiun KIPM Jambi Per 31 Desember 2023 tidak memiliki aset tak berwujud.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	
Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi Tambah:

1. Pembelian :

Tidak ada mutasi tambah.

2. Transfer Masuk senilai :

Tidak ada transfer masuk.

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2023

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
		0		
		0		
	Jumlah	0		

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp 467.151.240,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	467,151,240
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-467151240
- reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp 448.051.219,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp. 0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 13.032.803,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 13.032.803,- dan Rp 13.496.050,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Stasiun KIPM Jambi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2023*

No	Uraian	Jumlah
1	Beban listrik	10,042,903
2	Beban Internet	2,989,900
	Total	13,032,803

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp 13.032.803,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 13.032.803,- dan Rp 13.496.050,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Beban Keperluan perkantoran	2,989,900	2,853,300
Beban Langganan listrik	10,042,903	10,567,100
Beban Langganan telepon	-	75,650
Jumlah	13,032,803	13,496,050

*Ekuitas
Rp.441.756.318*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.441.756.318 dan Rp8.829.295.476 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp 29,590,000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 29.590.000,- dan Rp 57.945.000,-. Penurunan sebesar 49% pendapatan PNBPNP Per 31 Desember 2023 dari tahun sebelumnya disebabkan menurunnya permintaan untuk pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya di Laboratorium SKIPM Jambi. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	29,590,000	57,945,000	(49)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan			0
Jumlah	29,590,000	57,945,000	(49)

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai Rp
3.865.044.748*

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.865.044.748 dan Rp 3.836.842.611. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai mengalami kenaikan sebesar 1 % dari Tahun 2022

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,318,647,600	1,330,845,725	(1)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-53	(329)	(84)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	94,970,280	93,738,200	1
Beban Tunj. Anak PNS	31,216,040	29,976,830	4
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	15,120,000	17
Beban Tunj. Fungsional PNS	95,270,000	102,165,000	(7)
Beban Tunj. PPh PNS	1,970,479	2,150,846	(8)
Beban Tunj. Beras PNS	80,024,100	81,255,240	(2)
Beban Uang Makan PNS	210,982,000	230,720,000	(9)
Beban Tunjangan Umum PNS	13,805,000	11,820,000	17
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-370,000		
Beban Lembur	314,245,000	279,976,000	12
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,686,624,250	1,659,054,664	2
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	20,052	20,435	(2)
Jumlah	3,865,044,748	3,836,842,611	1

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2023

Beban Persediaan dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 322.460.374 dan Rp 303.907.054. *Beban Persediaan* merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian *Beban Persediaan* untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	168,930,594	221,979,799	(24)
Beban Persediaan Bahan Baku	153,529,780	81,927,255	87
Beban persediaan lainnya			
Jumlah	322,460,374	303,907,054	6

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Jumlah *Beban Barang dan Jasa* Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.515.836.668 dan Rp 1.267.209.631. *Beban Barang dan Jasa* terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian *Beban Barang dan Jasa* untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	622,179,688	600,595,376	3.59
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	86,394,497	65,880,000	31.14
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,046,000	1,664,250	22.94
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115,200,000	125,202,000	(7.99)
Beban Barang Operasional Lainnya	73,758,950	50,642,500	45.65
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19		11,615,450	
Beban Bahan	195,153,532	63,095,550	209.30
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	22,635,315		
Beban Langganan Listrik	165,056,528	153,641,468	7.43
Beban Langganan Telepon	616,358	933,932	(34.00)
Beban Langganan Daya dan Jasa		35,566,355	
Beban Sewa	57,490,000	56,900,000	1.04
Beban Jasa Profesi	6,300,000	4,500,000	40.00
Beban Jasa Lainnya	160,845,800	88,442,750	81.86
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid - 19		370,000	
Beban Aset Estrakomtabel Peralatan dan Mesin			
Jumlah	1,515,836,668	1,267,209,631	19.62

*Beban
Pemeliharaan
Rp
537.125.132*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 537.125.132 dan Rp 401.950.119 mengalami kenaikan sebesar 33,63% dari Tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	216,170,500	172,578,850	25.26
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	320,729,032	209,100,672	53.38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	-	-	
Beban Persediaan Suku Cadang		306,000	(100.00)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	225,600	19,964,597	(98.87)
Jumlah	537,125,132	401,950,119	33.63

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
620.464.850*

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 620.464.850 dan Rp 394.913.500 mengalami kenaikan sebesar 57,11% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	315,706,450	223,081,450	41.52
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65,590,000	40,405,000	62.33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,600,000		0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	226,568,400	131,427,050	72.39
Jumlah	620,464,850	394,913,500	57.11

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi Rp
485.513.406*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 485.513.406 dan Rp 631.239.651. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	356,116,290	500,691,746	(28.88)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	124,869,204	123,869,204	0.81
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4,527,912	4,527,912	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	2,150,789	-
Jumlah Penyusutan	485,513,406	631,239,651	(23.09)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	485,513,406	631,239,651	(23.09)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp12.749.955,-*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan	0	0	0.00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	6,350,000	0	0.00
Beban kerugian pelepasan aset	(19,100,021)	0	0.00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(12,750,021)	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	66	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	66	0	0.00
Defisit Selisih Kurs			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(12,749,955)	0	0.00

*) *Pendapatan/ Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp
8.829.295.476

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.829.295.476 dan Rp9.497.516.657.

Defisit LO
Rp
7.329.605.133

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.329.605.133 dan Rp6.784.097.056. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan
Per 31 Desember 2023*

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp 0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Per 31 Desember 2023*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain
Per 31 Desember 2023*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Kewajiban	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar Entitas
Rp
6.942.065.975*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.942.065.975 dan Rp6.115.875.875. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

***Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2023***

Transaksi Antar Entitas	TA 2023	TA 2022
Diterima dari Entitas Lain	Rp (35,940,066)	(57,945,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,978,006,041	6,172,504,775
Transfer Masuk		
Transfer Keluar		-
Pengesahan Hibah Langsung		1,316,100
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		-
Jumlah	Rp 6,942,065,975	6,115,875,875

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(35.940.066) sedangkan DKEL sebesar Rp6.978.006.041.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan

perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- terdiri dari:

No	TGLBUKU	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1			-
2			-
	Jumlah		-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2023 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp
8.441.756.318

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.441.756.318 dan Rp8.829.295.476.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

A. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebanyak 104 NUP senilai Rp473.481.240,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 386/13/2003 tanggal 7 Juni 2023 dan telah dicatat pada akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) senilai Rp6.350.000,00. Peralatan dan Mesin sebanyak 104 NUP telah di keluarkan dari Neraca pada TA 2022.

B. Pengungkapan Program Prioritas Nasional Skipm Jambi

Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIPM Jambi terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 3 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut

- Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaannya di antaranya melalui lima program prioritas, sebelas kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun KIPM Jambi dengan pagu mencapai Rp 720.089.000,- dan realisasi sebesar Rp 692.418.430,- (96,16%) dengan rincian sebagai berikut.

NAMA SATKER	PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (RP)	REALISASI I (RP)	%	SATUAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN RINCIAN OUTPUT	%
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sector kelautan perikanan	96.500.000	84.075.700	87,13%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	40.000.000	39.839.000	99,60%	Lembaga	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	5.000.000	5.000.000	100%	Produk	2	2	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Unit kerja yang menerapkan system manajemen	46.000.000	45.657.950	99,26%	Lembaga	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaaan ikan yang diselesaikan	31.494.000	31.321.400	99,45%	Perkara	4	4	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	211.145.000	210.591.080	99,74%	Produk	5.710	5.882	100

Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan bisecurity	39.500.000	39.105.000	99%	Lembaga	10	11	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar system dan regulasi	44.450.000	44.019.950	99,03%	Laporan	1	4	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	50.000.000	49.387.700	98,78%	Produk	2	2	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Sarana Pengawasan karantina	106.000.000	104.199.000	98,30%	Unit	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	UPI yang konsisten menerapkan sitem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	50.000.000	39.221.650	78,44%	Lembaga	2	2	100

C. Capaian Output Strategis Skipm Jambi

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh SKIPM Jambi terdiri dari 22 kegiatan yaitu 11 RO untuk kegiatan Prioritas Nasional dan 11 RO kegiatan Non Prioritas Nasional. Capaian Output SKIPM Jambi dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	URAIAN RINCIAN OUTPUT	PN / TEMATIK	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	PERSENTASE PENYERAPAN	TARGET KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	PROGRES CAPAIAN OUPUT
1	PBR001	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sector kelautan perikanan	PN	96.500.000	84.075.700	87,13%	1	1	100
2	ABR002	Rekomendasi kebijakan peta lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang bersifat invasif	NON PN	22.700.000	22.685.000	99,93%	2	2	100
3	PDD004	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	PN	40.000.000	39.839.000	99,60%	1	1	100
4	PDC001	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	PN	5.000.000	5.000.000	100%	2	2	100
5	PDD002	Unit kerja yang menerapkan system manajemen	PN	46.000.000	45.657.950	99,26%	1	1	100
6	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	NON PN	14.570.000	14.440.000	99,11%	1	1	100
7	QCE001	Perkara pelanggaran peraturan perkarantina ikan yang diselesaikan	PN	31.494.000	31.321.400	99,45%	4	4	100
8	CAN001	Alat pengolah data dan komunikasi lingkup BKIPM	NON PN	44.000.000	43.685.000	99,28%	4	4	100
9	EBD952	Layanan perencanaan dan penganggaran	NON PN	66.850.000	66.612.650	99,64%	1	1	100
10	PDC001	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	PN	211.145.000	210.591.080	99,74%	5.710	5.882	100
11	PDF001	Unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan bisecurity	PN	39.500.000	39.105.000	99%	10	11	100
12	QIA001	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar system dan	PN	44.450.000	44.019.950	99,03%	1	4	100

		regulasi							
13	ABR004	Rekomendasi kebijakan mitigasi resiko lalu lintas hasil perikanan	NON PN	5.000.000	5.000.000	100%	1	1	100
14	EBC954	Layanan Manajemen SDM	NON PN	62.442.000	62.293.750	99,76%	27	27	100
15	ADD001	Unit kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	NON PN	25.000.000	24.999.800	100%	1	1	100
16	ABR001	Rekomendasi kebijakan peta lokasi sebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)	NON PN	79.715.000	79.140.800	99,28%	8	8	100
17	QIA001	Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	PN	50.000.000	49.387.700	98,78%	2	2	100
18	EBA962	Layanan Umum	NON PN	180.440.000	179.856.632	99,68%	1	1	100
19	RAL001	Sarana Pengawasan karantina	PN	106.000.000	104.199.000	98,30%	1	1	100
20	ADF001	Sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan	NON PN	50.000.000	44.940.000	89,88%	5	5	100
21	QIC002	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	PN	50.000.000	39.221.650	78,44%	2	2	100
22	EBA994	Layanan Perkantoran	NON PN	5.782.390.000	5.742.304.032	99,31%	1	1	100